

**DARI GERAKAN KEPANDUAN KE GERAKAN PRAMUKA:
LAHIRNYA GERAKAN PRAMUKA DI INDONESIA TAHUN 1959-1961**

Oleh : Yogi Yanuar Ramadhani, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, arramadhan26@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan Gerakan Pramuka tak lepas dari pengaruh kebijakan yang diterapkan pemerintah. Hal ini terbukti ketika kebijakan Manipol Usdek yang diterapkan oleh pemerintah mulai mengubah sistem dalam gerakan Kepanduan, hingga pada tahun 1961 gerakan Kepanduan dibubarkan dan diubah menjadi gerakan Pramuka. Pasca bertransformasi menjadi gerakan Pramuka, pengaruh yang diberikan kepada masyarakat pun menjadi semakin besar, seperti pengaruh di bidang sosial dan pendidikan. Dalam bidang sosial, kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan bagi organisasinya. Hal ini terbukti karena gerakan Pramuka selalu diajarkan bagaimana cara untuk beradaptasi dalam segala situasi, salah satunya dalam berbaur dan berorganisasi di masyarakat. Dalam bidang Pendidikan, gerakan Pramuka merupakan salah satu sarana pendidikan karakter yang berada diluar kegiatan sekolah dan keluarga. Ini terjadi karena memang tujuan utama gerakan Pramuka ialah membentuk karakter yang berbudi luhur, bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan.

Kata Kunci: *Gerakan Kepanduan, Gerakan Pramuka, Indonesia*

ABSTRACT

The development of the scout movement was inexcusable over the influence of government policy. That was evident when government manipol usdek's policy began to change the system in the scout movement until 1961 the scouting movement was disbanded and turned into a scout movement. As a result of that transformation into a scout movement, the impact extended to the community grew, like social and educational influence. In social Settings, scouting isa tool for the community to meet the needs of the local community and for its organization. This is proven because the scout movement is always taught how to adapt in all situations, one of which is to blend and organize in communities. In education, the scout movement is one of the character educational tools that comes out of school and family. It is because the main purpose of the scout movement is to establish a virtuous, responsible, and leadership spirit.

Keyword: gentle maneuver, scout movement, Indonesia

PENDAHULUAN

Kemunculan kepanduan berawal dari seorang tentara Kerajaan Inggris yang bernama Lord Robert Baden Powell yang membentuk sebuah perkumpulan yang ditujukan untuk mendidik para pemuda dan pemudi Inggris yang bernama *Boy Scout* dan *Girls Scout*. Pada tahun 1908 Lord Baden Powell membuat sebuah buku *Scouting for Boys* yang terdiri dari 6 jilid.¹ Pada tahun 1907 Lord Baden Powell mengadakan perjalanan berkemah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kepanduan.²

Pada masa kolonial, kepanduan di Indonesia diperkenalkan oleh tentara Belanda yaitu P. J. Smiths dan Mayor de Yager.³ Mereka mendirikan organisasi kepanduan yang bernama *Nederlands*

Padvinders Organisatie (NPO) pada tahun 1912 di Batavia. Pada awal berdirinya NPO ini anggota yang boleh mengikuti organisasi kepanduan ini hanya orang-orang keturunan Belanda dan bangsawan saja sehingga eksistensi NPO kurang terangkat. Pada tahun 1914 *Nederlands Padvinders Organisatie* (NPO) berganti nama menjadi *Nederlands Indische Padvindeer Vereeniging* (NIPV) dan menjadi sebuah organisasi yang independen.

Pada tahun 1916 Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan bernama *Javaansche Padvinders Organisatie* (JPO). Anggota JPO merupakan anak-anak dan remaja Mangkunegaran yang sebelumnya mengikuti kepanduan NIPV. Tujuan dibentuknya JPO adalah untuk mengimbangi dominasi kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda. Berdirinya JPO menjadi awal dari terbentuknya organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang menerapkan sistem organisasi kepanduan yang formal dan modern serta bersifat universal. Pasca berdirinya JPO banyak organisasi-

¹Amaroso Katamsi, dkk, *40 Tahun Gerakan Pramuka*, (Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2001), hlm. 17.

²*Ibid.*, hlm 17.

³Prawoto Indarto, *Meretas Jejak: Sultan Hamengkubuwono IX Bapak Pramuka Indonesia*, (Yogyakarta: Kwarda XII Gerakan Pramuka DIY, 2017), hlm 31.

organisasi kepanduan lain yang mulai berdiri di Indonesia.

Perkembangan kepanduan di Indonesia semakin pesat, hal itu dibuktikan dengan adanya kepanduan *Nationale Padvinders* yang dibentuk oleh organisasi Boedi Oetomo dan dipimpin oleh Daslan Adi Warsito. Seiring berjalannya waktu serta semakin banyaknya gerakan kepanduan yang muncul akhirnya memunculkan keinginan agar organisasi-organisasi kepanduan tersebut bersatu dalam satu kesatuan menjadi sebuah organisasi kepanduan nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai pedoman dalam penulisan sejarah agar karya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sejarah, yang pertama yaitu heuristik yang merupakan langkah awal dalam mengumpulkan sumber sejarah yang mendukung. Kedua kritik sumber berarti usaha meneliti keaslian dan kebenaran sumber. Ketiga, interpretasi yaitu menafsirkan fakta-

fakta sejarah yang terdapat pada sumber. Terakhir adalah historiografi proses penulisan atau penyampaian dalam bentuk karya sejarah.

Tujuan tulisan ini guna mengetahui perkembangan Gerakan Kepanduan, khususnya pada tahun 1959-1961. Adapun tujuan selanjutnya ialah untuk mengetahui pengaruh kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap Gerakan Kepanduan. Selain itu, untuk mengetahui pula pengaruh kemunculan Gerakan Pramuka terhadap masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gerakan Kepanduan Di Indonesia

Pada awalnya *Padvinders* merupakan kelompok kecil yang muncul dari kalangan murid-murid sekolah Belanda pada tahun 1912 di Jakarta.⁴ *Padvinders* merupakan bagian dari organisasi induk

⁴Abdurrachman Surjomihardjo, "*Kota Yogyakarta Tempo Dolo: Sejarah Sosial 1880 – 1930*", (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm 159.

kepanduan yang ada di Belanda. Seiring dengan berkembangnya organisasi pergerakan nasional sudah terpikirkan adanya regenerasi pemimpin yang sewaktu-waktu dibutuhkan agar tidak terjadi kekosongan dalam kepemimpinan.⁵ Organisasi kepanduan didirikan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki moral pemuda tetapi juga bertujuan untuk mencari kader politik organisasi induknya. Dalam Organisasi ini kepanduan bukan sebagai lingkungan pendidikan ketiga disamping rumah dan sekolah tetapi sebagai tempat persemaian kader-kader pemimpin gerakan politik.

Sejalan dengan lahirnya organisasi pemuda maka lahirlah organisasi kepanduan yang merupakan kelanjutan dari proses regenerasi dan sosialisasi organisasi induknya. Sejak diperkenalkan di Indonesia, kepanduan menjadi

organisasi kepemudaan yang penting di Indonesia. Sebelum dilakukan fusi menjadi satu organisasi pada tahun 1961 terdapat banyak organisasi kepanduan yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari kalangan non-politik sampai organisasi politik mendirikan organisasi kepanduan.⁶ Organisasi kepanduan yang diharapkan menjadi sarana pendidikan ketiga setelah rumah dan sekolah, tetapi oleh organisasi politik dijadikan tempat untuk mencari kader pemimpin pergerakan politik. Padahal sejatinya organisasi kepanduan bersifat non-politik dan universal karena diperuntukkan bagi semua kalangan.

Boy Scout dalam bahasa Belanda disebut dengan *Padvinderij* mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1912 dengan nama NPO (*Nationale Padvinders Organisatie*) kemudian

⁵Suhartono, "Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm 99.

⁶Pujo Semedi, "Padvinders, Pandu, Pramuka: Pemuda dan Negara Indonesia Abad Kedua Puluh", dalam Sri Margana & M. Nursam, *Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm 319.

nama tersebut berubah menjadi NIPV (*Nederlandsche Indische Padvinders Vereniging*) pada tahun 1914.⁷ Mulanya NIPV mencari anggota dari anak-anak keturunan Eropa, kemudian NIPV mulai menjaring anggota dari golongan pribumi. NIPV menetapkan syarat untuk anak-anak yang ingin menjadi anggota NIPV yaitu, calon anggota NIPV harus memenuhi syarat *etische Koers* yang berlaku dalam sistem politik pemerintahan Kolonial Belanda.⁸

Mangkunegara VII memahami bahwa dengan direngkuhnya anak-anak Pribumi khususnya yang berada di wilayah Mangkunegaran akan mengakibatkan mereka lupa dengan kebudayaan lokal mereka karena harus dituntut loyal kepada Ratu Belanda, patuh pada pemerintah

kolonial serta memiliki kemungkinan bahwa anak-anak akan lebih mengagumi negara yang menjajahnya daripada bangsanya sendiri. Pemuda dan anak-anak kemudian diorganisir kedalam sebuah organisasi bernama JPO (*Javaansche Padvinders Organisatie*) pada tahun 1916. Organisasi Kepanduan ini merupakan tempat latihan bagi calon pemimpin dan tempat pembinaan bagi pegawai dan tentara Mangkunegaran.⁹ JPO memiliki sumpah yaitu Setia Kepada Pangeran dan Cinta Tanah Air, berbeda dengan Kepanduan Bangsa Eropa yang mengajarkan para anggotanya untuk menanamkan rasa luhur ke arah perdamaian dunia.

Tahun 1930, ketika terjadi krisis *malaise* JPO tidak luput dari dampak tersebut. akibatnya aktivitas latihan JPO menjadi terganggu

⁷R. Darmanto Djodibroto, "*Pandu Ibuku: Mengajarkan budi Pekerti, Membangun Karakter Bangsa*", (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012), hlm 72.

⁸Heri Priyatmoko, "*Menempa Bocah Mangkunegaran*", Makalah Seminar Dies Natalis Fakultas Sastra USD, 26 April 2016, hlm 2.

⁹Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, "*Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Hindia Belanda*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm 433.

karena mengalami gangguan keuangan. JPO yang berencana untuk mengikuti Jambore Dunia yang diselenggarakan di Vogelenzang, Belanda tahun 1937 tidak dapat mengikuti acara tersebut karena NIPV tidak mengizinkan Organisasi Kepanduan diluar NIPV untuk ikut serta. Selain itu JPO juga terkendala masalah keuangan karena paa saat itu krisis malaise melanda Indonesia. Pada saat itulah NIPV mengajak JPO untuk bergabung ke dalam NIPV. JPO yang awalnya menolak akhirnya mamutuskan untuk bergabung ke dalam NIPV sehingga JPO diberikan izin oleh NIPV untuk mengirim anggotanya ke jambore dunia.¹⁰ Anggota JPO yang berangkat mengikuti jambore antara lain: R. M. Darmoro, R. M. Soenarso, R. M.

¹⁰Kota-Kota di Jawa, *op. cit.*, hlm. 327.

Sarsadi, M. Sastrosoekotjo, M. Soeroto dan M. Partojo.¹¹

Tahun 1918, terbentuk kepanduan yang diprakarsai oleh Ahmad Dahlan dengan nama *Padvinders Muhammadiyah*.¹² Setelah 2 tahun berjalan nama *Padvinders Muhammadiyah* kemudian diganti dengan nama *Hizbul Wathon*. Kegiatan tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Banyak anak-anak dan pemuda yang mengikuti latihan tersebut. Sistem kepanduan yang dimiliki oleh HW tidak jauh berbeda dengan sistem kepanduan yang lain. Perbedaannya adalah pendidikan yang diajarkan dalam kepanduan HW menerapkan sistem pendidikan yang islami meskipun dasar-dasar ilmu kepanduan HW sebagian besar sama dengan kepanduan yang lain. Hal tersebut dijelaskan dalam kode kehormatan HW. HW secara tegas menolak untuk mengakui

¹¹Pandu Ibuku, *op. cit.*, hlm. 122.

¹²Meretas Jejak, *op. cit* hlm 32.

pemerintahan Kolonial Belanda dan besumpah setia kepada Ratu Belanda karena hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan aspirasi mereka tentang kemerdekaan nasional.¹³ Kepanduan HW ini dikhususkan bagi anak laki-laki. Hal tersebut berkaitan dengan anggapan ulama bahwa kegiatan kepanduan tidak cocok untuk perempuan.¹⁴

Tahun 1921, Boedi Oetomo, Organisasi kebangsaan pertama Indonesia yang didirikan oleh dr. Soetomo, dr. Cipto Mangunkusumo dan dr. Wahidin Sudiro Husodo mendirikan Organisasi Kepanduan bernama *Nationale Padvinderij*. Daslan Adi Warsito kemudian ditunjuk sebagai pimpinan *Nationale Padvinderij*. Kemudian *Jong Java* cabang Mataram yang berada di

Yogyakarta mendirikan *Jong Java Padvinderij* (JJP) dengan Ir. Soepardi sebagai pemimpinnya. Organisasi Kepanduan ini adalah Organisasi pertama yang menggunakan bendera pasukan dengan simbol gula kelapa dan yang pertama kali menggunakan kaku leher/hasduk dengan warna merah putih sebagai atribut mereka. Tahun 1923, para pemimpin Pandu berkumpul di Bandung untuk mengadakan sebuah pertemuan, dalam pertemuan tersebut ada dua pendapat :

1. Pendapat yang menginginkan agar organisasi kepanduan bergabung dengan NIPV.
2. Pendapat yang menginginkan agar organisasi kepanduan tidak bergabung dengan NIPV tetapi langsung

¹³Kota-Kota di Jawa, *op. cit.*, hlm. 324.

¹⁴Sardiman, *Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman*, (Yogyakarta: Ombak, 2008), hlm. 37.

bergabung dengan asosiasi kepanduan dunia.

Pada masa pemerintahan Jepang praktis tidak ada kegiatan kepanduan karena pemerintah Jepang melarang setiap kegiatan kepanduan namun, jiwa kepanduan tetap melekat pada setiap anggota pandu.¹⁵ Para pemuda Indonesia dikirim untuk bergabung dengan *Seinendan*, *Keibodan*, *Heiho* dan PETA. Para pemuda yang bergabung ke dalam pasukan bentukan Jepang tersebut sebagian besar merupakan anggota pandu. Tahun 1943, dengan segala upaya para anggota pandu kembali berusaha untuk menyelenggarakan PERKINO. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terlaksananya PERKINO II pada tahun 1943.¹⁶ Kegiatan kepanduan kembali berjalan setelah Indonesia merdeka yang ditandai dengan

¹⁵Kota-Kota di Jawa, *op. cit.*, hlm. 329.

¹⁶Andrik Suprianto, “Pernanan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dalam Perkemahan Kepandoean Indonesia Oemoem (PERKINO) tahun 1941”, *artikel*, (Universitas Negeri Malang, 2011), hlm. 12.

dibentuknya Pandu Rakyat Indonesia (PRI).

B. Pembubaran Gerakan Kepanduan dan Kelahiran Pramuka

Soekarno menginginkan adanya perubahan dalam gerakan kepanduan yang menurutnya kurang pas dengan situasi dan kondisi pergerakan di Indonesia dan menginginkan agar gerakan kepanduan dilebur dan dibebaskan dari Baden Powellisme yang dianggap sebagai produk imperialis, kapitalis, dan kolonialis. Situasi yang tidak kondusif tersebut dimanfaatkan oleh golongan komunis agar dapat memperkuat eksistensinya di Indonesia. Melalui menteri PP dan K Prof. Prijono, golongan komunis kemudian mengupayakan konsep Pionir sebagai perubahan dari Organisasi Kepanduan dapat direalisasikan oleh pemerintah.¹⁷ Prof. Prijono kemudian merancang konsep kepanduan tersendiri untuk

¹⁷Zaidan Rahmat Nurhayat, “Gerakan Pramuka dibawah Pimpinan Sri Sultan Hamengkubwono IX”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hlm 28.

kemudian diajukan melalui PERPU dalam rapat kabinet.

Dalam menghadapi upaya golongan komunis yang ingin mengubah gerakan kepaduan menjadi pionir, IPINDO kemudian mengumpulkan organisasi kependuan yang ada. Tanggal 6 – 8 Mei 1960, dibawah pimpinan Sultan Hamengkubuwno IX para pandu dari berbagai organisasi kependuan mulai dikumpulkan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Presiden Ir. Djuanda dan Menteri PP dan K Prof. Prijono. Dalam pertemuan tersebut Ir. Djuanda mengusulkan agar organisasi kependuan dipersatukan dan disempurnakan sehingga sesuai dengan UUD 45.

Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit yang isinya mengembalikan dasar negara Indonesia dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Kembali dipergunakannya UUD 1945 membawa Indonesia memasuki periode Baru dalam sistem pemerintahannya, yaitu sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin

atau masa Orde Lama. Keberadaan organisasi kependuan dianggap cocok menjadi salah satu alat untuk menerapkan manipol-USDEK. Apalagi organisasi kependuan telah dikenal dalam mendidik anak-anak Indonesia, sehingga keinginan tersebut dapat ditransformasikan pada organisasi kependuan.

Sayangnya keberadaan organisasi kependuan yang terpecah-pecah tidak memungkinkan terlaksananya keinginan tersebut.¹⁸ Dihadapan para pemimpin-pemimpin kependuan Presiden Soekarno menyatakan keputusannya untuk membubarkan semua gerakan kependuan Indonesia dan meleburkannya ke dalam kependuan nasional bernama Praja Muda Karana (Pramuka). Presiden Soekarno menyatakan melakukan hal tersebut semata-mata demi kepentingan negara dan para pemimpin kependuan seharusnya bersedia untuk bergabung ke dalam pramuka.¹⁹

¹⁸Zaidan Rahmat Nurhayat, *op. cit.*, hlm 18

¹⁹Kota-Kota di Jawa, *op. cit.*, hlm. 332.

Pada tanggal 5 April 1961 dikeluarkan Kepres No. 112/1961 tentang pembentukan panitia pelaksana pembentukan gerakan pramuka yang berisi empat orang yaitu, Prof. Prijono, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Dr. Aziz Saleh dan Achmadi.²⁰ Perbedaan kepentingan yang terjadi dalam panitia pembentukan gerakan pramuka membuat Dr. Aziz Saleh kembali memperhitungkan komposisi panitia yang dirasa masih kurang menguntungkan bagi kalangan kepanduan. Dr. Aziz Saleh mengusulkan agar kepanduan juga harus ada kaitannya dengan unsur keagamaan. Dr. Aziz Saleh kemudian mengusulkan menteri Sosial Muljadi Djojomartono untuk dimasukkan dalam struktur panitia pembentukan gerakan pramuka mewakili unsur agama.

Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Kepres No. 121/1961 tertanggal 11 April 1961 dengan

²⁰ANRI No. 6671, Sekretaris Negara Seri Produk Hukum tentang Badan Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka.

susunan panitia antara lain: Sri Sultan Hamengkubuwono, Prof. Prijono, Dr. Aziz Saleh, Achmadi, dan Muljadi Djojomartono²¹. Dalam kepres tersebut juga dijelaskan bahwa panitia tersebut harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasilnya kepada Presiden sebelum tanggal 17 Agustus 1961. Sekembalinya Presiden dari kunjungan luar negeri, Presiden menerima laporan dari Ir. H. Djuanda tentang pembentukan Gerakan Pramuka dan Presiden meminta agar Pramuka segera diperkenalkan pada masyarakat pada tanggal 14 Agustus 1961. Tanggal 14 Agustus 1961, melalui Kepres No.

447/1961²² Presiden Soekarno secara

²¹ANRI No. 6680, Sekretaris Negara Seri Produk Hukum Keputusan Presiden tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka.

²²ANRI No. 34, Kwarnas Gerakan Pramuka 1961-1974,

resmi mengesahkan Gerakan Pramuka sebagai gerakan kepanduan di Indonesia.

C. Pengaruh Gerakan Pramuka Terhadap Masyarakat

Pemerintah Orde Lama telah menetapkan tujuan utama dari Gerakan Pramuka untuk ikut membantu pembangunan negara dengan cara terjun dalam masyarakat. berdasarkan keputusan Presiden No. 157 Tahun 1963, tanggal 27 Juli 1963, Gerakan Pramuka kemudian ditetapkan sebagai aparatur pembantu pemerintah dan dimasukkan ke dalam kewenangan Wakil Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat. Keputusan ini membawa dampak tersendiri bagi Gerakan Pramuka yang pada dasarnya sebagai sarana dalam mendidik karakter anak, justru menjadi alat dalam melaksanakan program pemerintah.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan dibantu oleh Hs. Mutahar mulai membentuk tatanan Organisasi

Salinan Sekretariat Negara tentang Susunan Pengurus MAPINAS, KWARNAS dan KWARNARI.

Gerakan Pramuka, dimulai dengan membentuk Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang disetiap daerah teritori kemudian membentuk Satuan Karya (SAKA). Ketika memasuki tingkatan Pandega para anggota pramuka mulai memilih SAKA, melalui SAKA inilah para pramuka pandega dianjurkan untuk terjun langsung dalam Masyarakat sebagai bentuk Bakti Sosial mereka kepada masyarakat.²³ Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan bagi organisasinya.²⁴ Sebagai contoh pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka seperti pembangunan bendungan Jatiluhur, Jawa Barat yang dilakukan oleh SAKA Taruna Bumi, Pembangunan jalan sepanjang 2 Km di DKI yang dikenal sebagai Jl. Pramuka.

²³Wawancara dengan Kak Prijo Mustiko pada tanggal 25 November 2018.

²⁴Azrul Azwar, *Mengenal Gerakan Pramuka*, (Jakarta: Erlangga, tt), hlm. 7.

Pendidikan Kepramukaan di Indonesia termasuk salah satu segi pendidikan nasional yang penting karena merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.²⁵ Gerakan Kepanduan merupakan salah satu sarana pendidikan karakter yang berada diluar kegiatan sekolah dan keluarga. Pada dasarnya Gerakan Pramuka dibentuk dengan tujuan untuk membantu memperbaiki moral para pemuda Indonesia agar menjadi lebih baik dan untuk mengabdikan kepada masyarakat.²⁶ Gerakan Pramuka dianggap menjadi sarana pendidikan yang tepat dalam hal pendidikan kejiwaan dan karakter pemuda Indonesia.

Pramuka merupakan sebuah gerakan yang mendukung bidang pendidikan. Pendidikan merupakan usaha membina kepribadian dan kemajuan manusia baik fisik maupun

²⁵Sarkonah, *Panduan Pramuka: Penggalang*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 10-11.

²⁶Wawancara dengan Kak Gunawan Kunto Wibisono pada tanggal 1 Oktober 2018.

moril, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia khususnya menjadikan manusia yang lebih bermanfaat dan berkualitas.²⁷ Salah satu cara untuk memajukan suatu bangsa, maka diperlukan orang-orang yang memiliki karakter agar tercipta suatu bangsa yang maju dan berkembang.²⁸

Gerakan Pramuka mulai masuk dalam lingkungan sekolah pada masa kepemimpinan Soeharto. Keadaan para siswa saat itu juga tengah mengalami perpecahan, hal itu disebabkan karena adanya kalangan pelajar yang ikut dalam Organisasi-Organisasi pelajar yang berhaluan kiri, namun ada juga pelajar yang ikut dalam Organisasi yang berhaluan kanan. Hal tersebut mengakibatkan adanya perpecahan dikalangan pelajar. Soeharto kemudian membubarkan organisasi pelajar yang berhaluan kiri kemudian membentuk organisasi baru yang

²⁷Mahmud, dkk. "Pengaruh Pendidikan Kepramukaan", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 6, Juni 2017. Hlm. 146.

²⁸*Ibid.*

disebut OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan memasukkan Gerakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler sekolah. Sejak saat itulah Gerakan Pramuka menjadi ekstrakurikuler di sekolah.

KESIMPULAN

Terbentuknya Gerakan Pramuka tak lepas dari adanya campur tangan pemerintah. Soekarno yang merasa kurang puas atas kinerja dari Organisasi Kepanduan yang menurutnya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi politik di Indonesia pada saat itu, sehingga ada keinginan dari Soekarno untuk membentuk Organisasi baru dan bebas dari Baden Powellisme yang dianggap sebagai produk imperialis, kapitalis, dan kolonialis dengan melebur semua Gerakan Kepanduan. Ketika Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan dasar Negara Indonesia dari UUD 1950 menjadi UUD 1945 yang menjadi awal diterapkannya kebijakan Manipol-USDEK. Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah

dibubarkannya Gerakan Kepanduan yang disampaikan oleh Soekarno dihadapan para pemimpin Gerakan Kepanduan.

Gerakan Pramuka menjadi salah satu alat untuk mendukung tujuan pemerintah dalam bidang sosial dan pendidikan. Satuan Karya (SAKA) dibentuk dengan tujuan agar para Anggota Pramuka dapat terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Gerakan Pramuka menjadi lembaga pendidikan non-formal yang berada diluar sekolah dan rumah. Gerakan Pramuka menjadi sarana pendidikan karakter bagi setiap individu anggotanya agar memiliki kepribaian yang baik. Banyak kegiatan dalam Gerakan Pramuka yang bertujuan untuk membentuk karakter setiap individu maupun ketika berkelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ANRI No. 6671, Sekretaris Negara Seri Produk Hukum tentang Badan Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka.

ANRI No. 6680, Sekretaris Negara Seri Produk Hukum Keputusan Presiden tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka.

ANRI No. 34, Kwarnas Gerakan Pramuka 1961-1974, Salinan Sekretariat Negara tentang Susunan Pengurus MAPINAS, KWARNAS dan KWARNARI.

Buku, Artikel dan Jurnal

Abdurrachman Surjomihardjo, *“Kota Yogyakarta Tempo Dolo: Sejarah Sosial 1880 – 1930”*, Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2008

Amaroso Katamsi, dkk, *40 Tahun Gerakan Pramuka*, Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2001

Andrik Suprianto, *“Pernanan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dalam Perkemahan Kepandoean Indonesia Oemoem (PERKINO) tahun 1941”*, artikel, Universitas Negeri Malang, 2011.

Azrul Azwar, *Mengenal Gerakan Pramuka*, Jakarta: Erlangga, tt

Heri Priyatmoko, *“Menempa Bocah Mangkunegaran”*, Makalah

Seminar Dies Natalis Fakultas Sastra USD, 26 April 2016.

Mahmud, dkk. *“Pengaruh Pendidikan Kepramukaan”*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 6, Juni 2017.

Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *“Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Hindia Belanda”*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011

Pujo Semedi, *“Padvindens, Pandu, Pramuka: Pemuda dan Negara Indonesia Abad Kedua Puluh”*, dalam Sri Margana & M. Nursam, *Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: Ombak, 2010

Prawoto Indarto, *“Meretas Jejak: Sultan Hamengkubuwono IX Bapak Pramuka Indonesia”*, Yogyakarta: Kwarda XII Gerakan Pramuka DIY, 2017

R. Darmanto Djojodibroto, *“Pandu Ibuku: Mengajarkan budi Pekerti, Membangun Karakter Bangsa”*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012

Sardiman, *Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman*, Yogyakarta: Ombak, 2008

Sarkonah, *Panduan Pramuka: Penggalang*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013

Suhartono, "*Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994

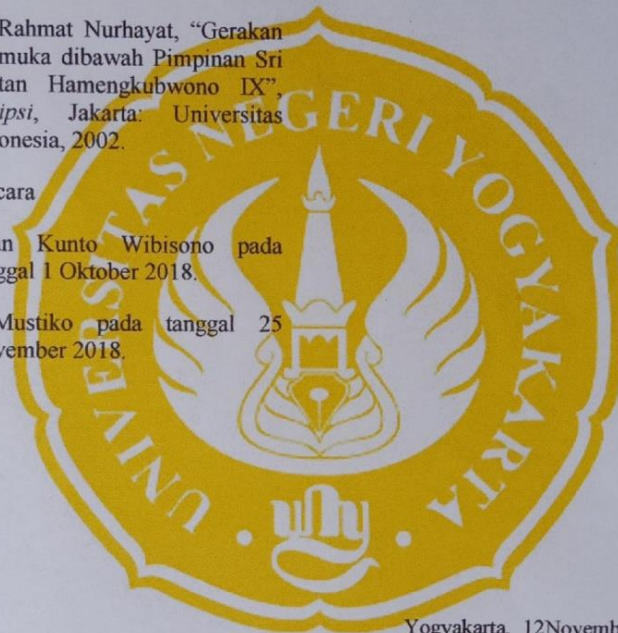
Skripsi

Zaidan Rahmat Nurhayat, "*Gerakan Pramuka dibawah Pimpinan Sri Sultan Hamengkubwono IX*", Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.

Wawancara

Gunawan Kunto Wibisono pada tanggal 1 Oktober 2018.

Prijo Mustiko pada tanggal 25 November 2018.



Yogyakarta, 12 November 2019

Pembimbing TAS

Ita Mutiara Dewi, M.Si
NIP.19810321 200312 2 001

Reviewer

Dr. Miftahuddin, M.Hum
NIP. 19580121 198601 1 001